



## Penerapan Sistem Keuangan BUMDESA Amanah Di Desa Karanganyar Kecamatan Plupuh, Sragen

Andy Dwi Bayu Bawono<sup>1</sup>, Heppy Purbasari<sup>1\*</sup>, Devi Afriantari Puspa Putri<sup>1</sup>, Nursiam<sup>1</sup>, Banu Witono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

\*Email koresponden: [hp123@ums.ac.id](mailto:hp123@ums.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 2 Juli 2023

Accepted: 15 Juli 2023

Published: 10 Agu 2023

#### Kata kunci:

SAK ETAP,  
Akuntansi,  
Sistem Keuangan,  
BUMDesa

#### Keywords:

SAK ETAP,  
Accounting,  
Financial  
Management System,  
BUMDesa

### ABSTRAK

**Background:** Undang-undang Desa beserta peraturan turunannya telah merubah dan mendorong pola kemandirian di desa salah satu melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai pendorong perekonomian desa. Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah memiliki BUMDesa bernama BUMDesa "Amanah" yang berdiri sejak Tahun 2018. Akan tetapi pengelolaan keuangan di BUMDesa tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan salah satu unit usaha berupa pelayanan air minum belum memiliki pengelolaan produksi yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi mitra (BUMDesa "Amanah") dalam menyusun dan menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan BUMDesa, manajemen pengelolaan produksi dan pelayanan termasuk pengujian kualitas air minum. **Metode:** Kegiatan ini terdiri dari FGD, Pelatihan penyusunan laporan keuangan yang mencakup pemahaman dasar-dasar akuntansi dan pendampingan manajemen produksi dan pelayanan unit PAM. **Hasil:** Hasil yang diperoleh selama kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penetapan nama akun dan kode akun yang sesuai dengan SAK ETAP, penerapan aplikasi system pengelolaan keuangan BUMDesa Amanah, beserta hasil laboratorium pengujian air. Kegiatan pengabdian masyarakat di BUMDesa Amanah Desa Karanganyar Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen telah menghasilkan system pengelolaan keuangan BUMDesa yang dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan secara terintegrasi dari masing-masing unit. Selain itu kegiatan ini juga menghasilkan pengujian kualitas air sebagai bentuk pemberian informasi kepada pelanggan SR

### ABSTRACT

**Background:** The Indonesian Law No. 6/2014 on Villages and its subsidiary regulations have altered and encouraged patterns of independence in villages, one of which is the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) as an economic support for villages. In 2018, the BUMDesa named "Amanah" was established in Karanganyar Village, Plupuh Subdistrict, Sragen. However, the financial management of BUMDesa "Amanah" is not in accordance with the accounting standard. In addition, one of the business divisions providing drinking water services lacks effective production management. This community service activity aims to assist partners (BUMDesa "Amanah") in preparing and implementing the Village Financial Management System using the BUMDesa Financial Management Application System, management of production and service management, including the testing of drinking water quality. **Method:** This activity employs the FGD method and provides training in the preparation of financial reports, which includes accounting fundamentals and production and service management support for the PAM unit. **Result:** Among the outcomes of community service are the designation of account names and account codes in accordance with SAK ETAP, the application of the BUMDesa Amanah financial management system, and the laboratory results of water testing. Community service activities at BUMDesa Amanah Karanganyar Village, Plupuh District, Sragen Regency have resulted in the creation of a BUMDesa financial management system that can be utilized to generate integrated financial reports from each entity. In addition, water quality testing is conducted as a means of providing information to SR customers.



## PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang No 6 (2014) tentang Desa membuat desa dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan desa baik dari sisi pendapatan yang diterima desa dan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan desa. Pendapatan yang diperoleh desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Selain itu Desa masih menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terutama dalam laporan keuangan desa (Kementerian Desa, 2021).

Adanya tuntutan untuk mandiri dan memberdayakan masyarakatnya, maka desa berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan mengembangkan hasil usaha, salah satu hasil usaha yang dimiliki desa yaitu mendirikan BUMDesa (Kementerian Desa, 2015). Lama sebelum UU Desa lahir, Bumdes atau BUMDesa atau sebutan lainnya dikenal sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Sedangkan pasca UU Desa lahir, BUMDesa didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 (2021) tentang BUMDesa junto Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 (2021) Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama tersirat bahwa untuk menampung kegiatan-kegiatan desa maka dapat didirikan BUMDesa, dimana BUMDesa didirikan atas dasar kesepakatan warga. BUMDesa didirikan untuk menjadi roda penguat ekonomi desa dan sebagai salah satu sumber pendapatan PADes (Wibowo & Hapsari, 2022). Tetapi ternyata tidak semua desa mampu mendirikan BUMDesa seperti yang disampaikan Situmorang, (2020) menyatakan bahwa 122 desa di Kabupaten Bengkayang hanya memiliki 5 BUMDesa.

Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah, pengembangan BUMDesa yang cukup masif dan pesat di Indonesia justru belum diimbangi dengan dukungan sistem pengelolaan keuangan yang mumpuni (Harto & Riwandari, 2019). Seperti di BUMDesa Kayu Bawang belum mampu menyediakan laporan keuangan karena memiliki kendala sumber daya manusia (Binti et al., 2021).

Saat ini, BUMDesa/Bumdes belum memiliki sebuah sistem pengelolaan yang cukup kuat guna mendukung proses usahanya untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang diungkapkan, transparan dan akuntabel. Pengungkapan, transparansi dan akuntabel merupakan bagian dalam *good governance*. Ana & Ga, (2021) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan BUMDesa Ina Huk belum informatif dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Sawitri et al., (2020) mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa yaitu belum adanya pengelolaan keuangan yang menyebabkan tidak optimal pengelolaan BUMDesa.

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan sebelumnya pada lokasi mitra ditemukan bahwa di Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, sejalan dengan amanat peraturan perundangan yang telah disebutkan sebelumnya, sejak Tahun 2018 telah mendirikan BUMDesa melalui rintisan usaha berbentuk Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang

dikemudian hari ditetapkan dengan nama BUMDesa "Amanah" melalui Peraturan Desa Karanganyar Nomor 05 Tahun 2021. Saat ini BUMDesa tersebut telah memiliki empat unit usaha berupa Unit LKD, Unit Penyediaan Air Minum (PAM), Unit Penyediaan Air Baku (Sumur Sawah) dan Internet Desa. Saat ini unit lembaga keuangan desa telah melayani simpan pinjam warga dengan nilai simpanan 600 juta rupiah. Di samping itu, unit PAM dan sumur sawah telah dapat melayani kebutuhan warga masyarakat setempat dalam mencukupi kebutuhan air minum dan air baku. Sedangkan Internet Desa yang dilaksanakan di Desa Karanganyar telah berjalan dengan baik dengan menggandeng mitra penyedia jaringan telekomunikasi ICON+ dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Walaupun BUMDesa telah berjalan dengan baik, akan tetapi, empat unit usaha tersebut, saat ini masih menyusun laporan keuangannya dalam bentuk laporan sederhana berbasis Microsoft Excel. Laporan keuangan tersebut saat ini belum terintegrasi antar unit usaha dan belum berbasis pada amanat PP No. 11 tentang BUMDesa dan SAK ETAP. Di sisi lain pelayanan Unit PAM sampai sekarang masih dilaksanakan secara tradisional, beberapa aspek indikator manajemen produksi dan pelayanan PAM diantaranya jumlah debit air, kualitas air minum, kelancaran pasokan di setiap waktu dan kepuasan pelanggan sampai sekarang belum pernah dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, permasalahan mitra yaitu BUMDesa Amanah adalah:

1. Aspek Penyusunan Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan pada BUMDesa "Amanah" masih secara tradisional dan menggunakan aplikasi sederhana (Microsoft Excel) perlu diperbaiki dan dirubah dan disesuaikan dengan SAK ETAP, teknis penyusunan laporan keuangan belum mengikuti alur proses akuntansi sehingga masih kurang akuntabel. Sumber daya manusia sebagai ujung tombak penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan juga masih belum memiliki kemampuan secara teknis untuk menyusun/menyediakan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga diperlukan pelatihan, desain awal system sebagai dasar penyesuaian system aplikasi pengelolaan keuangan BUMDesa berbasis software computer yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Tim PKM UMS dan telah diaplikasikan pada BUMDesa "Amanah" di Desa Karanganyar Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen serta penerapan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BUMDesa.
2. Meningkatkan Kapasitas Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Amanah. Pelayanan Unit PAM sampai sekarang masih dilaksanakan secara tradisional, beberapa aspek indikator manajemen produksi dan pelayanan PAM diantaranya jumlah debit air, kualitas air minum, kelancaran pasokan di setiap waktu dan kepuasan pelanggan sampai sekarang belum pernah dilakukan. Sehingga dibutuhkan pendampingan untuk pengujian air minum, pengukuran debit air dan pasokan setiap musim, dan survey kepuasan masyarakat sebagai pelanggan PAM.

## METODE

### 1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Pengembangan Mitra

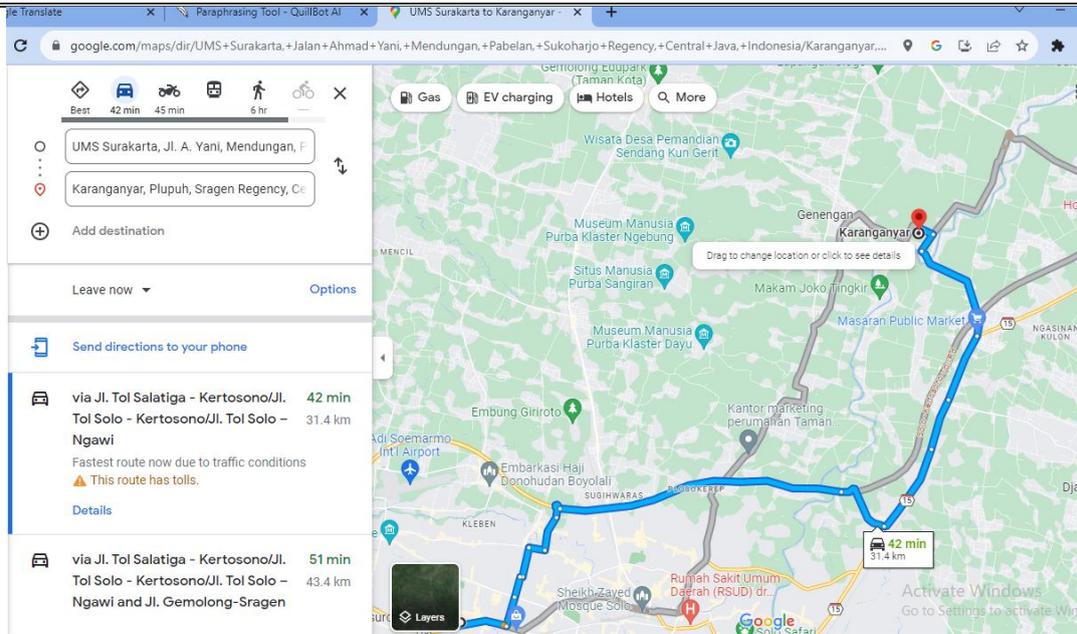
Kegiatan pengembangan usaha mitra melibatkan beberapa pihak dengan kontribusi sebagai berikut :

Tabel 1. Kontribusi Tim Pengabdian Masyarakat

No.	Pihak yang dilibatkan	Kontribusi
1	BUMDesa Amanah, Desa Karanganyar, Kab. Sragen	Menyediakan Sumber Daya Manusia, sample Air Minum, Ruangan, Furniture dan Jaringan untuk penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, Manajemen tata kelola LKD, serta manajemen produksi dan pelayanan PAM
2	Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kab. Sragen	Menyediakan dukungan pendanaan berupa penyertaan modal untuk pengembangan pelayanan BUMDesa dan turut serta mendampingi BUMDesa untuk menyelaraskan system pengelolaan keuangan BUMDesa dengan Sistem Keuangan Desa.
3	Pemerintah Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen	Memberikan dukungan berupa kebijakan dan pendampingan dalam perbaikan pelayanan Unit-unit BUMDesa, dan penyelarasan pengelolaan keuangan BUMDesa dengan sesuai peraturan yang berlaku.
4	LPPM UMS & Pelaksana	Mengembangkan system terkomputerisasi untuk pengelolaan keuangan BUMDesa, membantu dan mendampingi proses penyusunan indicator pada PAM dan pengujian sampel air minum pada laboratorium. Dan menyediakan pakar/narasumber sesuai kompetensi yang diperlukan untuk mencapai target dan luaran kegiatan dan mendampingi mitra dalam mengadopsi system yang dikembangkan

## 2. Lokasi Pengabdian

Lokasi pengabdian dilaksanakan di Kantor BUMDesa "Amanah", Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, yang berjarak dengan 31,4 km dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Gambar 1. Jarak lokasi pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta

### 3. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PKM di Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ini membutuhkan waktu 10 bulan dengan menggunakan pendekatan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) dan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). RRA dan PRA adalah falsafah, pendekatan metode yang dikenal sebagai memahami desa secara cepat (Mardiana et al., 2020). Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I; Tahap *Forum Group Discussion* (FGD) untuk identifikasi persoalan dan rencana *problem solving* yang akan ditempuh dan disepakati bersama.



Gambar 2. *Forum Group Discussion*

- b. Tahap II; Tahap pelatihan kepada pengelola dan penyusun laporan keuangan terkait pemahaman dasar-dasar akuntansi, dan pendampingan manajemen produksi dan pelayanan Unit PAM melalui penyusunan indicator-indikator yang dibutuhkan.

Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di kantor BUMDesa Amanah dan di Balai Desa Karanganyar Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

#### 4. Deskripsi Produk yang Akan Diimplementasikan ke Mitra

Teknologi yang akan diterapkan adalah sistem aplikasi pengelolaan keuangan BUMDesa yang telah dipatenkan dan akan disesuaikan (customisasi) dengan kebutuhan BUMDesa "Amanah". Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan BUMDesa akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa "Amanah". Disamping itu, sistem aplikasi pelayanan unit LKD akan memudahkan pelayanan Unit Usaha tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Sedangkan perbaikan manajemen produksi dan pelayanan PAM akan meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan PAM.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan implementasi teknologi ke mitra, akan dilakukan oleh LPPM UMS/Tim Pelaksana dengan Pengurus BUMDesa "Amanah", Pemerintah Desa dan Kecamatan, agar keberlanjutan dan pengembangan system serta penerapan manajemen tata kelola yang telah dilatihkan berjalan dengan baik.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Bumdesa Amanah

Bumdesa Amanah di Desa Karanganyar Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang memiliki empat unit usaha telah berjalan dan memiliki karyawan untuk mengelola unit-unit tersebut. Adapun produk dan jumlah pengelola dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2. Jenis Usaha tiap Unit

No	Unit Usaha	Produk	Jumlah Pengelola
1	Penyediaan air baku	Pengairan sawah	2 karyawan
2	Penyediaan air minum	Air minum	3 karyawan
3	LKD	Simpan pinjam	3 karyawan
4	Internet Desa	Internet	2 karyawan

Unit usaha yang dihasilkan Bumdesa Amanah dibuat berdasarkan kebutuhan warga. Semakin banyaknya unit usaha yang dikelola Bumdesa, maka Bumdesa dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Berdasarkan permasalahan Bumdesa Amanah, tim pengabdian masyarakat mengatasi permasalahan melalui cara sebagai berikut:

#### 2. Penyelesaian Permasalahan Mitra

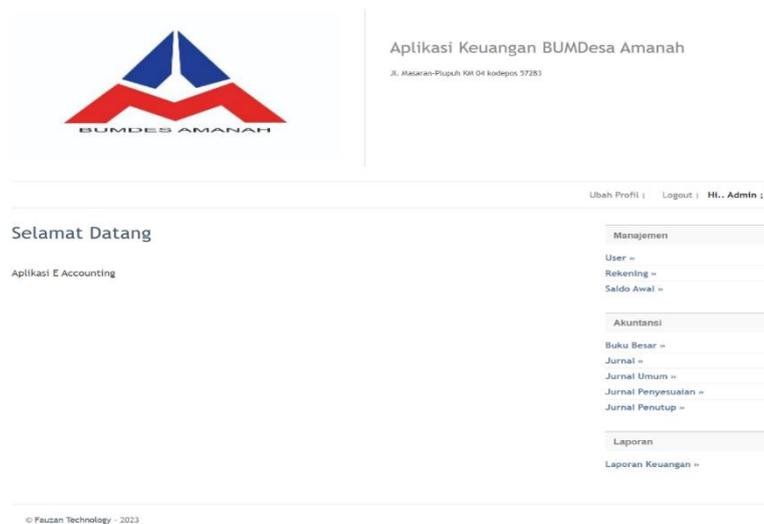
- a. Aspek Penyusunan Sistem Pengelolaan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan peraturan perundangan yang berlaku

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas public dimana entitas menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP memiliki bentuk pengaturan akuntansi yang sederhana. Untuk itu tim pengabdian masyarakat melakukan tinjauan laporan keuangan Bumdesa Amanah. Hasil dari tinjauan laporan keuangan diperoleh kesimpulan bahwa selama ini laporan keuangan yang telah dihasilkan adalah neraca dan laba rugi masing-

masing unit usaha. Tetapi laporan keuangan yang dihasilkan masing-masing unit usaha tidak sama, Selanjutnya, laporan laba rugi yang dihasilkan tiga unit tersebut belum memiliki nomer akun transaksi sehingga yang tertulis dilaporan laba rugi hanya nama akun transaksi. Akun-akun tersebut masih menggunakan pendekatan single entry dan hanya berkorelasi dengan akun-akun nominal yang terdapat dalam laporan laba rugi, sehingga apabila dalam pembuatan laporan neraca Bumdesa Amanah mengalami kendala karena belum memiliki akun riil.

Untuk membantu Bumdesa dalam pembuatan laporan keuangan, tim pengabdian masyarakat dan pengelola Bumdesa membuat dan menyepakati akun nominal dan akun riil yang sesuai dengan SAK ETAP yang juga meliputi penyusunan nomor akun dan nama akun. Akun nominal dan akun riil yang sudah tersedia, kemudian dikembangkan ke dalam penyusunan system pengelolaan keuangan yang berbasis my SQL. System pengelolaan keuangan digunakan untuk membantu Bumdesa Amanah dalam pembuatan laporan keuangan secara *real time*.

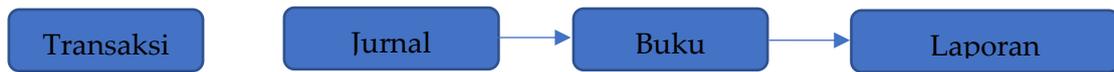
Dalam rangka penyesuaian dengan SAK ETAP, maka tim menyediakan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat membantu BUMDesa dalam pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Dalam system ini terdapat menu yang dapat digunakan untuk menunjang pencatatan laporan. Adapun menu tersebut terdiri dari: rekening, saldo awal, buku besar, jurnal, jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan. Aplikasi pengelolaan keuangan ini dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh bendahara dan user lainnya di Bumdesa Amanah. Tampilan system aplikasi pengelolaan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Halaman Depan

Pembuatan system pengelolaan keuangan BUMDesa diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan keuangan (Savitri et al., 2022; Susila et al., 2022). Kegiatan pengabdian masyarakat juga memiliki tujuan untuk membantu BUMDesa dalam pendampingan laporan keuangan yang berbasis web sehingga dapat memberikan efek yang baik, disebabkan teknologi informasi akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Ishak & Syam, 2020)

Proses akuntansi dalam system ini terdiri dari pencatatan database dan pencatatan akuntansi hingga menjadi laporan keuangan sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Akuntansi

b. Meningkatkan Kapasitas Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Amanah

Adanya system aplikasi yang berdasarkan SAK ETAP hal ini memberikan kemudahan kepada bendahara BUMDesa Amanah dalam pembuatan laporan keuangan. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini juga memberikan pelatihan akuntansi dasar kepada bendahara dan sekretaris Bumdesa. Kegiatan pelatihan dimaksudkan untuk membantu pengelola BUMDesa dalam menjalankan system keuangan, proses akuntansi, penjelasan akun riil dan akun nominal, jurnal transaksi dan fungsi dari laporan keuangan (Situmorang, 2020).



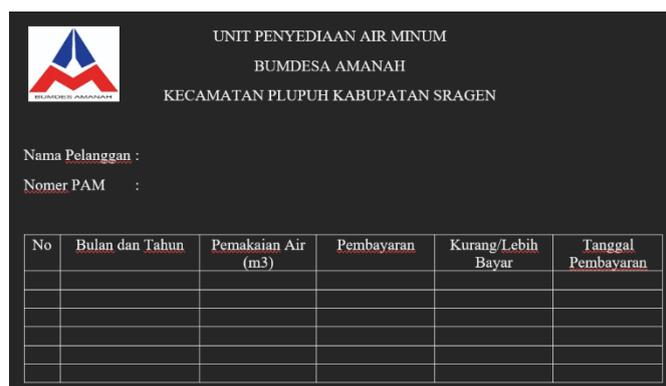
Gambar 5. Pelatihan Akuntansi dan Praktek penggunaan aplikasi

Setelah dilakukan pelatihan, tim pengabdian masyarakat masih melakukan pendampingan dalam pengoperasian system secara online maupun offline agar system dapat digunakan dengan maksimal dan tepat guna.

c. Aspek Manajemen Produksi dan Pelayanan Unit Penyediaan Air Minum (PAM)

Unit PAM di BUMDesa Amanah yang bernama Dono Tirto HAMP sampai sekarang belum dilakukan uji ulang kualitas air, untuk itu tim pengabdian melakukan pengecekan ulang air PAM sebagai bentuk manajemen produksi. Manajemen produksi memiliki tujuan lainnya untuk meningkatkan pelanggan PAM, yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan PAM dan calon pelanggan melalui pengecekan kualitas air secara periodic. Dengan adanya kualitas air yang baik maka kecenderungannya pelanggan PAM juga akan meningkat, untuk itu unit PAM harus menyediakan pencatatan administrasi yang baik.

Selama ini pengelolaan produksi dan pelayanan unit PAM masih dilakukan secara manual dan tidak ada pemisahan tagihan dan pembayaran dari pelanggan PAM. Untuk itu tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan dalam management pencatatan keuangan PAM, dan mendeteksi adanya kebocoran. Dalam pendampingan pencatatan keuangan tim pengabdian masyarakat memberikan template tagihan pemakaian air (buku pembantu piutang) yaitu sebagai berikut:



Gambar 8. Buku Pembantu Piutang Pelanggan PAM

Buku Pembantu Piutang tersebut dapat digunakan untuk mengetahui rincian pemakaian air dan tagihan pembayaran PAM secara *real time*. Selanjutnya, dari total pendapatan yang diterima unit PAM dapat dimasukkan dalam system keuangan yang diakui sebagai pendapatan unit PAM. Buku pembantu piutang ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi pengeluaran air yang terlalu besar pada titik-titik jalur pipa. Sejalan dengan buku pembantu piutang, BUMDesa Giri Artha menerapkan system informasi berbasis aplikasi di smartphone yang memberikan informasi kepada konsumen tentang biaya yang harus dibayar (Yanti & Musmini, 2020).

Sedangkan untuk mendeteksi adanya kebocoran, tim pengabdian masyarakat melakukan pelatihan dalam menghitung umur ekonomis pipa melalui metode penyusutan dan memantau pengeluaran air yang tidak wajar pada titik tertentu. Penghitungan penyusutan pipa menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Selanjutnya, dengan melihat kondisi lapangan, apabila terjadi kebocoran pipa tidak akan langsung dapat ditemukan dikarenakan pipa ditanam di dalam tanah. Penanaman pipa ini sebenarnya memberikan keuntungan kepada Bumdesa agar pipa tidak cepat rusak, tetapi kalau ada kebocoran maka tidak akan cepat diketahui. Untuk itu operator lapangan dan akuntansi harus dapat menganalisis kebocoran dengan memantau pengeluaran air.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi BUMDesa Amanah dari sisi produksi

Unit Dono Tirto HAMP yang berdiri mulai bulan Juli 2020 hingga pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlangsung telah memiliki 182 pelanggan Sambung Rumah (SR). Pelanggan SR memiliki kewajiban untuk membayar biaya pemakaian air Rp 1.000/m<sup>3</sup> dan beban/bulan Rp 5.000. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan SR, tim pengabdian masyarakat dan BUMDesa Amanah melakukan cek ulang kualitas air, dan hasil yang diperoleh dari cek laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Laboratorium Bakteriologi

Sampel Air	Hasil Analisa MPN Caliform	Satuan
Air Bersih	0	CFU/100 ml

(Source: hasil pemeriksaan laboratorium)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh nilai MPN Caliform memiliki angka 0 yang berarti air memenuhi syarat bakteriologi sebagai air bersih. Selanjutnya, pengujian laboratorium tersebut menghasilkan informasi bahwa air Dono Tirto HAMP tidak memiliki bau, rasa dan hasil-hasil pengujian fisika dan kimia yang memenuhi standar kesehatan. Sehingga air yang dihasilkan Dono Tirto HAMP memiliki kualitas air bersih dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di BUMDesa Amanah Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang terlaksana selama 10 bulan telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penyusunan pelaporan keuangan BUMDesa untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan BUMDesa kepada pemangku kepentingan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BUMDesa. Selanjutnya kegiatan ini telah menghasilkan system pengelolaan keuangan BUMDesa yang terintegrasi dari unit-unit yang dikelola BUMDesa. Dengan adanya system pengelolaan keuangan memberikan kemudahan kepada pengelola BUMDesa dalam membuat laporan keuangan yang tepat waktu. Sebagai tambahan, hasil laboratorium kualitas air, menunjukkan air yang dikelola oleh BUMDesa Amanah memiliki penilaian bersih dan bebas dari bahan kimia sehingga dapat dikonsumsi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pembiayaan sebagai sumber dana utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, terima kasih kepada pengelola BUMDesa Amanah di Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang telah bersedia menjadi mitra kegiatan pengabdian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Binti, R. E., Yuliani, R., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., & Yasin, M. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3459>
- Harto, P. P., & Riwandari, R. (2019). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 167–188. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4>
- Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Tilmuta). *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120–130. <https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/view/45>
- Kementerian Desa, P. (2021). Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021. *Berita Negara Republik Indonesia*, 252, 1–137. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Kemertrian Desa, P. D. T. dan T. R. I. (2015). Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. *Jakarta*, 1–65.
- Mardiana, T., Warsiki, A., & Heriningsih, S. (2020). Menciptakan Peluang Usaha Ecoprint Berbasis Potensi Desa dengan Metode RRA dan PRA. *Prosiding Konferensi Pendidikan Nasional "Strategi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Pada Era Revolusi Industri 4.0,"* 282–288.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa*, 1–71.
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2022). Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes Berbasis Web. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 2(6), 268–277. <https://doi.org/10.31258/cers.2.6.268-277>
- Sawitri, A. P., Afkar, T., Suhardiyah, M., & Suharyanto. (2020). Penguatan Pengelolaan Keuangan BUMDes Sebagai Upaya Menuju Desa Mandiri di Desa Kebontunggul Mojokerto. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 470–476. <https://doi.org/10.21067/jpm.v5i2.4324>
- Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUMDes Di Kabupaten Bengkayang.

*Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.953>

Susila, I., Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2022). Peningkatan Kemampuan Bumdes dalam Pengelolaan Keuangan melalui Aplikasi MY-SQL. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 107–113. <https://doi.org/10.31334/jks.v4i2.2048>

UU, N. 6. (2014). *Undang - Undang n0 6 tahun 2014*. 1–71.

Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>

Yanti, P. M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 47–58.